

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang kompeten tidak hanya menjadi modal dasar pembangunan, melainkan juga penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang (Damanik et al., 2021). Paradigma pembangunan ekonomi modern telah mengalami pergeseran, yang sebelumnya menitikberatkan pada pembangunan fisik kini fokus pada pengembangan kualitas manusia (Suhartono, 2022).

Pentingnya pembangunan manusia sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan seluruh negara mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Beberapa tujuan utama SDGs berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti penguatan sektor kesehatan, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pada mencakup pengembangan kemampuan dasar manusia yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, penguatan jati diri, serta kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya (Purwaningsih et al., 2021).

Pembangunan manusia menitikberatkan pada perluasan pilihan hidup masyarakat dan peningkatan standar hidup agar individu mampu menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan kreatif (Mohanty et al., 2016). Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu mengurangi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor kehidupan,

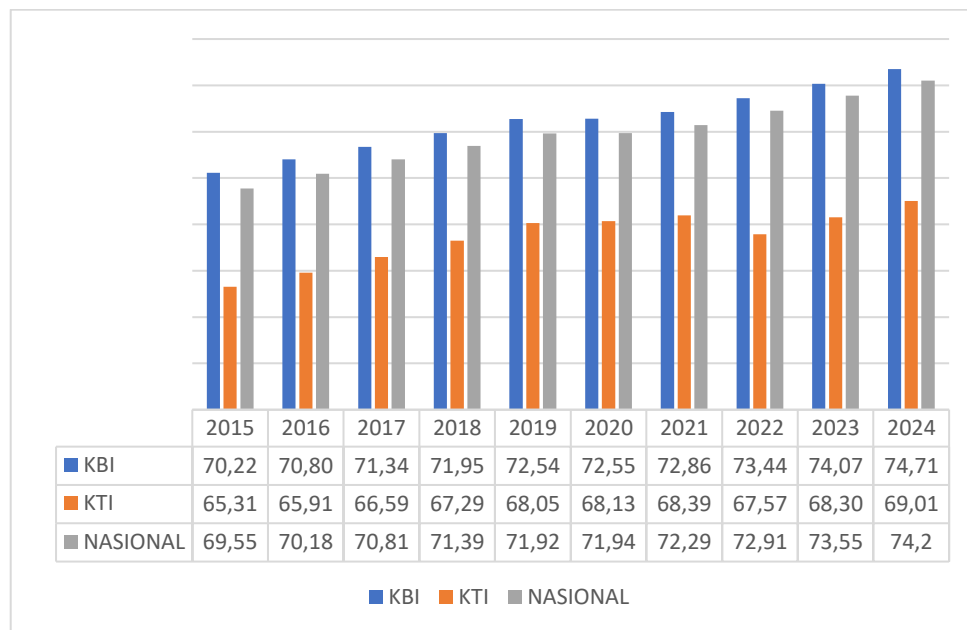
sedangkan kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat perkembangan perekonomian suatu daerah (Fentiani et al., 2025).

Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *The United Nations Development Programme* (UNDP) menetapkan IPM sebagai metrik untuk menilai efektivitas dan kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indikator ini mencakup tiga aspek utama aspek kesehatan, pendidikan, dan tingkat pengeluaran (Suparta & Septian, 2023). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan klasifikasi atau tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah (Komariyah et al., 2023). Berdasarkan klasifikasinya, tingkat pembangunan manusia dibedakan ke dalam empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi (Bappenas, 2023). Melalui klasifikasi tersebut, IPM menjadi indikator penting dalam menyebarkan dampak kebijakan ekonomi dan sosial terhadap kualitas hidup Masyarakat (Azfirmawarman et al., 2023).

Indonesia memiliki 38 provinsi yang secara geografis terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Meskipun pembangunan nasional terus mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah yang ditunjukkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, akses teknologi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. pembagian kawasan ini menjadi fokus utama dalam RPJMN 2025–2029 yang menetapkan tujuan pembangunan kewilayahan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi pembangunan pedesaan dan

wilayah afirmasi, penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (PPN/Bappenas, 2025).

Gambar 1.1 Perbandingan rata-rata IPM KBI dan KTI Tahun 2015-2024
(Skala 1-100)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2026)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa selama periode 2015–2024 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sama-sama menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, laju pertumbuhan IPM di KTI masih relatif lebih lambat dibandingkan dengan KBI. Pada tahun 2024, IPM KBI telah mencapai angka 74,71, yang berada di atas rata-rata nasional 74,2, sementara IPM KTI masih tertinggal jauh di angka 69,01. Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan bahwa meskipun KTI terus mengalami kemajuan, laju pertumbuhannya belum mampu mengejar keteringgalan dari wilayah Barat. Selisih poin ini mengonfirmasi

bahwa masyarakat di Kawasan Timur masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses pilihan-pilihan dasar pembangunan manusia dibandingkan mereka yang berada di beberapa daerah seperti di Kawasan Barat (Arifin et al., 2021). Pertumbuhan IPM di wilayah timur cenderung lebih lambat akibat pembangunan yang tidak merata serta bersifat Jawa-sentris, ditambah lagi dengan tantangan keterbelakangan, keterisolasian, dan kemiskinan yang masih membayangi kawasan tersebut (Kasih & Santoso, 2024). Kondisi ini semakin menegaskan perlunya kebijakan yang lebih afirmatif untuk mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kawasan Timur Indonesia (Sutrisno & Taufiqurrachman, 2025).

Hal ini tercermin dari masih adanya disparitas pembangunan manusia antarwilayah, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), meskipun secara nasional Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan. Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah melalui Bappenas secara eksplisit menempatkan pembangunan kewilayahan sebagai prioritas nasional untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, termasuk pemerataan KBI–KTI, melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan (PPN/Bappenas, 2020). Lebih lanjut, RKP 2024 juga menegaskan bahwa indikator IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di KTI masih menjadi perhatian utama pembangunan wilayah (PPN/Bappenas, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Raafi'i et al. (2018) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih cenderung mengalami peningkatan, serta penelitian Primadianti & Sugiyanto (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya memberikan manfaat yang proporsional bagi kelompok masyarakat miskin.

Ketimpangan pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya kualitas hidup sejak sebelum kelahiran hingga sepanjang siklus kehidupan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan rendahnya status sosial ekonomi sehingga menghambat kesejahteraan Masyarakat (UNDP, 2019). Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam satu periode, tetapi juga berpotensi berlanjut dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kondisi ini semakin diperparah oleh berbagai permasalahan struktural, seperti terbatasnya infrastruktur pembangunan, tingginya tingkat kemiskinan, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas (Hariani & Ekaria, 2023).

Kesenjangan ini menciptakan perbedaan kualitas hidup yang signifikan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal (3T-Terdepan, Terluar, Teringgal) (Prasetyo et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia tidak dapat disamaratakan, melainkan memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor pendorong spesifik seperti pemerataan teknologi informasi, kualitas akses sanitasi, serta efektivitas pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah. Perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia antarprovinsi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya, layanan dasar, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Sehingga penting untuk memahami penyebab perbedaan Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia, penting untuk mengkaji beberapa faktor yang diduga

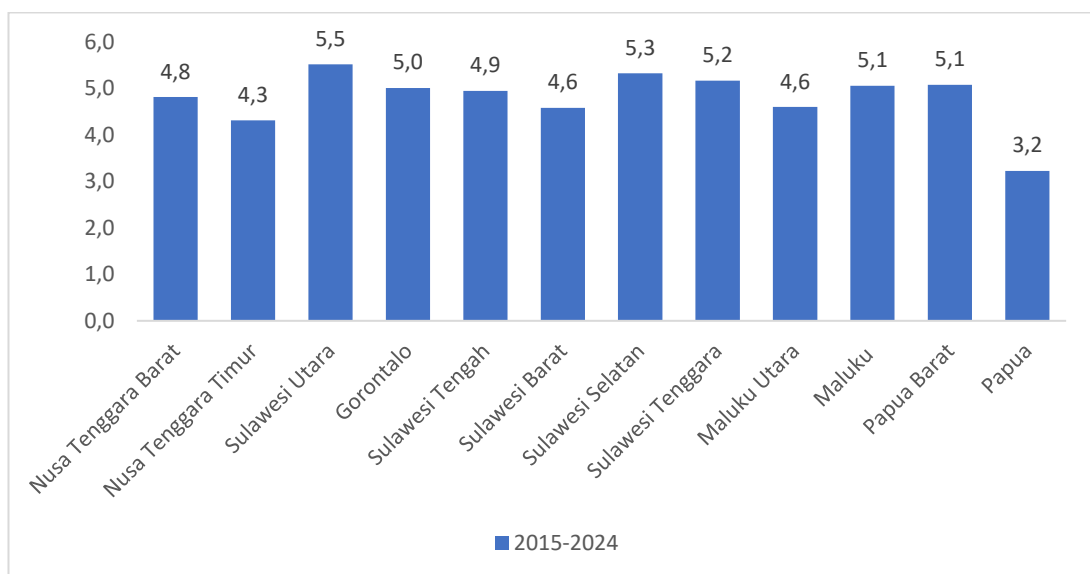
mempengaruhi pembangunan manusia, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kondisi akses sanitasi, serta tingkat kemiskinan.

Ketimpangan capaian kualitas hidup antarprovinsi di wilayah Timur tersebut dipengaruhi oleh akses terhadap berbagai faktor fundamental. Salah satu faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Kemajuan ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui perluasan akses informasi, pendidikan, serta peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara optimal memungkinkan masyarakat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi mendukung kesejahteraan, menciptakan efisiensi di berbagai sektor yang mempercepat proses pembangunan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 yang mendorong transformasi digital sebagai strategi afirmasi untuk memperkecil kesenjangan pembangunan di wilayah Timur. Hasil penelitian Zheng & Wang (2022) menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena perkembangan jaringan komunikasi seperti broadband dan telekomunikasi mampu meningkatkan pembangunan sosial, efisiensi ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan itu, Karaman Aksentijević et al., (2021) menyatakan bahwa penggunaan TIK dapat meningkatkan akses pendidikan, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup, sehingga berdampak positif pada pembangunan manusia.

Berikut perkembangan infrastruktur digital di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia periode 2015–2024 yang menunjukkan tren pertumbuhan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Rata-rata Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di 12 Provinsi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2024

(Skala 0-10)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3, rata-rata Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan adanya perbedaan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi antarprovinsi. Sulawesi Utara mencatatkan rata-rata IP-TIK tertinggi sebesar 5,5, diikuti oleh Sulawesi Selatan sebesar 5,3, Sulawesi Tenggara sebesar 5,2, serta Maluku dan Papua Barat yang masing-masing memiliki rata-rata 5,1. Tingginya rata-rata IP-TIK di beberapa provinsi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital, akses internet, serta pemanfaatan teknologi informasi telah berkembang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini berpotensi mendukung peningkatan

kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, serta aktivitas ekonomi berbasis digital. Di sisi lain, masih terdapat ketimpangan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kawasan Timur Indonesia. Papua memiliki rata-rata IP-TIK terendah, yaitu sebesar 3,2, disusul Nusa Tenggara Timur sebesar 4,3, sedangkan beberapa provinsi lainnya seperti Sulawesi Barat dan Maluku Utara masih berada pada kisaran 4,6. Perbedaan rata-rata IP-TIK tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses dan pemanfaatan informasi teknologi di Kawasan Timur Indonesia masih belum optimal.

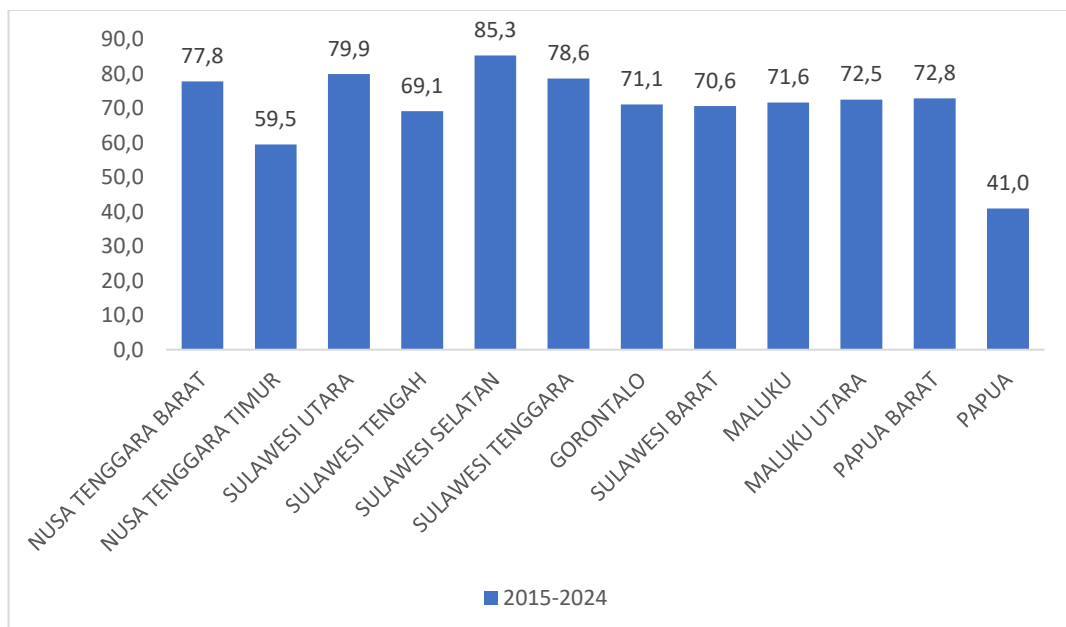
Kesenjangan digital antardaerah ini berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, pendidikan, dan peluang ekonomi, sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan manusia antarprovinsi di Kawasan Timur Indonesia. Secara empiris, kondisi tersebut didukung oleh berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Penelitian Nipo et al. (2023) menemukan bahwa perkembangan TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia, terutama melalui peningkatan akses internet yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Asongu & Le Roux, (2017) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong pembangunan manusia yang inklusif dengan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Kualitas pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh akselerasi teknologi, melainkan juga sangat bergantung pada faktor kesehatan lingkungan. Faktor lain yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah akses sanitasi karena berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. akses sanitasi merupakan sistem pengelolaan limbah manusia, air limbah, dan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta mencegah penyebaran penyakit. akses sanitasi yang layak berperan dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit menular yang dapat menurunkan produktivitas. Penelitian oleh Astutik & Dwi Tama, (2024) menunjukkan bahwa Akses Sanitasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM, Akses Sanitasi berhubungan erat dengan disparitas kesehatan dan status pembangunan manusia, di mana rumah tangga dengan akses sanitasi yang buruk memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit terkait sanitasi seperti diare dan infeksi lainnya dibandingkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak,

Penelitian Purwaningsih et al. (2021) menyatakan bahwa peningkatan pembangunan Akses Sanitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan Akses Sanitasi dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia karena masyarakat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat. Sebaliknya, keterbatasan akses sanitasi dapat menghambat peningkatan kualitas hidup dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pembangunan manusia. Ditegaskan pula oleh UNICEF & WHO, (2024) bahwa akses terhadap Akses sanitasi yang layak dapat menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan mendukung pembangunan manusia. Selain itu, akses sanitasi yang memadai berkontribusi dalam

mempercepat kesejahteraan karena masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat serta terhindar dari pencemaran, khususnya pencemaran sumber air akibat pembuangan limbah yang tidak terkelola. Kondisi ini menjadi krusial bagi wilayah Kawasan Timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar, sebagaimana tercermin dalam data akses sanitasi berikut:

Gambar 1.3 Akses Terhadap Akses Sanitasi Layak di 12 Provinsi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2024 (Dalam Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa rata-rata akses sanitasi layak di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan adanya perbedaan capaian antarprovinsi. Sulawesi Selatan memiliki rata-rata akses layak sanitasi tertinggi, yaitu sebesar 85,3%, disusul Sulawesi Utara sebesar 79,9%, Sulawesi Tenggara sebesar 78,6%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 77,8%. Tingginya rata-rata akses sanitasi di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur pelayanan sanitasi serta sanitasi layak telah berkembang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.

Sebaliknya, Papua memiliki rata-rata akses sanitasi layak terendah, yaitu sebesar 41,0%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur sebesar 59,5% dan Sulawesi Tengah sebesar 69,1%. Sementara itu, provinsi lainnya seperti Gorontalo (71,1%), Sulawesi Barat (70,6%), Maluku (71,6%), Maluku Utara (72,5%), dan Papua Barat (72,8%) berada pada tingkat akses sanitasi yang relatif sedang. Perbedaan rata-rata akses sanitasi layak tersebut menunjukkan bahwa pemerataan layanan sanitasi di Kawasan Timur Indonesia masih belum optimal, terutama di wilayah Papua yang masih tertinggal cukup jauh dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi, penyediaan akses air bersih, serta penguatan program sanitasi berbasis masyarakat agar kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lebih merata di seluruh Kawasan Timur Indonesia.

Perbedaan tingkat akses sanitasi antar daerah ini dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan infrastruktur fisik, keterbatasan akses layanan dasar di wilayah kepulauan, serta kapasitas fiskal daerah masing-masing. Rendahnya akses sanitasi di beberapa provinsi berdampak langsung pada tingginya risiko penyakit berbasis lingkungan, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan menjadi determinan penting dalam rendahnya capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut (Aji et al., 2024).

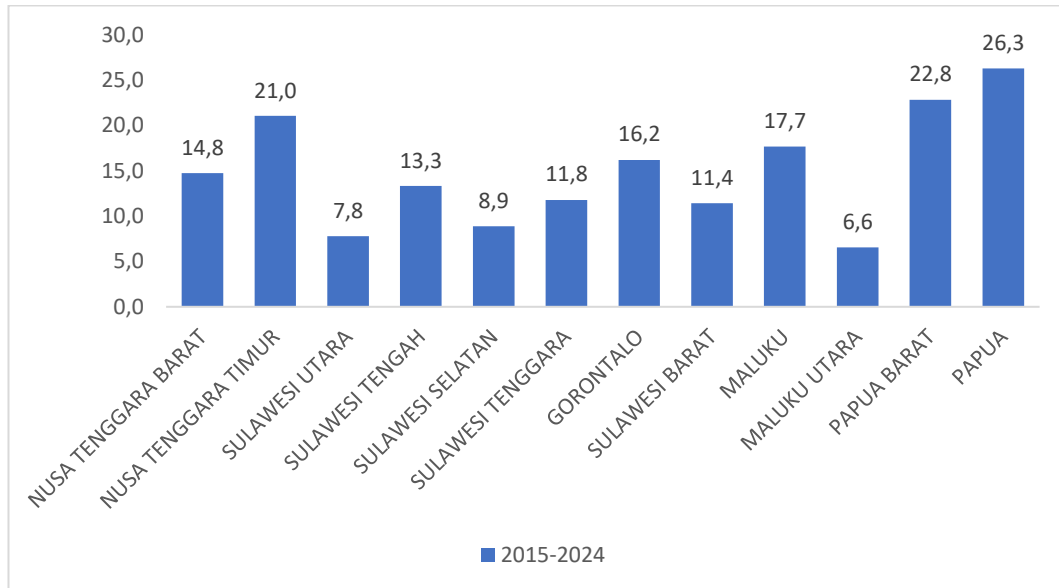
Di balik tantangan akselerasi digital dan infrastruktur fisik tersebut, terdapat faktor ekonomi yang lebih fundamental, yaitu tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan akar permasalahan yang membatasi kemampuan individu untuk mengakses fasilitas akses sanitasi yang layak maupun teknologi informasi yang mumpuni. Sebagai faktor ekonomi makro, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar

seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sehingga menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (Bappenas, 2018) Kemiskinan yang tidak segera ditangani dapat menciptakan 'lingkaran setan kemiskinan' (*vicious cycle of poverty*). siklus ini ditunjukkan oleh adanya pendapatan yang lebih rendah, yang menyebabkan kurangnya permintaan, produktivitas rendah yang akan berdampak pada tingkat pendapatan yang lemah dan pada akhirnya akan memperlambat pembangunan manusia.

Berdasarkan penelitian Al-nasser et al. (2019), Kemiskinan yang diukur dengan Human Poverty Index (HPI) terbukti berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Yordania. Hasil analisis menunjukkan hubungan linier negatif, dimana peningkatan kemiskinan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan menjadi hambatan utama peningkatan kualitas hidup karena deprivasi pada kesehatan, pendidikan, dan pendapatan menekan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Engolica & Chasanah (2025) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia artinya, peningkatan kemiskinan cenderung diikuti oleh penurunan Indeks Pembangunan Manusia., dalam penelitian tersebut pengaruh kemiskinan tidak terbukti signifikan secara statistik dalam jangka pendek. Meskipun demikian, arah hubungan yang ditemukan tetap konsisten dengan teori pembangunan yang menempatkan kemiskinan sebagai hambatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia, sehingga upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. secara berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia. Dinamika tingkat kemiskinan di dua belas provinsi Kawasan Timur

Indonesia periode 2015–2024 yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada data berikut:

Gambar 1.4 Rata-rata Persentase Penduduk Miskin di 12 Provinsi Kawasan Timur Indonesia Tahun 2015-2024 (Dalam Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2026)

Berdasarkan Gambar 1.4, rata-rata persentase penduduk miskin di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antarprovinsi. Papua memiliki rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 26,3%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 22,8% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 21,0%. Tingginya rata-rata tingkat kemiskinan di ketiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sebaliknya, Maluku Utara mencatatkan rata-rata persentase penduduk miskin terendah sebesar 6,6%, diikuti oleh Sulawesi Utara sebesar 7,8% dan Sulawesi Selatan sebesar 8,9%.

Sementara itu, provinsi lainnya seperti Sulawesi Barat (11,4%), Sulawesi Tenggara (11,8%), Sulawesi Tengah (13,3%), Nusa Tenggara Barat (14,8%), Gorontalo (16,2%), dan Maluku (17,7%) memiliki rata-rata tingkat kemiskinan yang berada pada kategori sedang. Perbedaan rata-rata persentase penduduk miskin tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia masih belum merata. Tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi, khususnya Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, mengindikasikan masih adanya keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas ekonomi, serta belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi produktif, dan pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Ketimpangan tingkat kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan manusia di KTI. Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi cenderung menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan berkualitas, yang tercermin dari capaian IPM yang cenderung lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih spesifik untuk memutus mata rantai kemiskinan di wilayah-wilayah dengan tingkat deprivasi tinggi agar target peningkatan IPM yang inklusif dapat tercapai. Ketimpangan kualitas hidup di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia (KTI) bisa dijelaskan dengan lebih mendalam melalui lensa teori modal manusia (*human capital theory*). Teori ini memandang pendidikan, kesehatan, dan akses informasi sebagai bentuk investasi penting agar seseorang bisa lebih produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di masa

depan. Membangun modal manusia tidak hanya soal menempuh pendidikan formal di sekolah saja, tetapi juga mencakup bagaimana kondisi lingkungan fisik yang sehat melalui akses sanitasi yang layak serta kemudahan akses teknologi (IP-TIK) memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara maksimal. Perbedaan tingkat kesejahteraan dan pendapatan antarwilayah sebenarnya bermuara dari perbedaan besar-kecilnya investasi pada kualitas manusia di daerah tersebut. Jika masyarakat di suatu provinsi sulit mendapatkan layanan kesehatan dasar dan akses internet, mereka secara otomatis kehilangan banyak kesempatan untuk maju, sehingga angka IPM di wilayah tersebut cenderung jalan di tempat atau tertinggal jauh dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia (Windhani et al., 2023).

Penelitian dari Diebolt & Hippe (2018) menegaskan bahwa dampak jangka panjang modal manusia terhadap kemajuan suatu daerah secara keseluruhan. Mereka menemukan bahwa daerah yang memiliki dasar modal manusia yang kuat cenderung lebih mudah menerima dan menggunakan teknologi baru untuk mendorong kemajuan ekonomi dan inovasi. Wilayah yang modal manusianya rendah akan tetap sulit untuk maju meskipun perangkat teknologi sudah tersedia di sana, karena masyarakatnya belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola kemajuan tersebut menjadi sesuatu yang produktif. Fenomena ini menjelaskan mengapa provinsi-provinsi dengan layanan dasar yang buruk di KTI sulit untuk mengejar ketertinggalan mereka; sebab investasi besar pada teknologi tidak maksimal jika tidak didukung oleh perbaikan kualitas kesehatan masyarakat melalui akses sanitasi dan penanganan masalah kemiskinan yang baik.

Pentingnya investasi modal manusia melalui kemajuan teknologi informasi ini didukung secara nyata oleh temuan Nipo et al. (2023) yang menunjukkan

bahwa TIK memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap pembangunan manusia, khususnya pada tingkat pembangunan manusia tinggi dan menengah. Penggunaan internet terbukti memberikan pengaruh yang nyata terhadap pembangunan manusia pada kedua kelompok tersebut, sementara langganan seluler hanya terlihat nyata pada kelompok yang tingkat pembangunan manusianya sudah tinggi. Temuan ini memberikan gambaran bahwa peningkatan penggunaan TIK dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi penting, layanan publik, pendidikan, hingga kesehatan.

Aksentijević et al. (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa penggunaan TIK berpengaruh positif dan sangat nyata terhadap pembangunan manusia. Pengaruh ini terlihat sangat kuat terutama pada tingkat pendapatan menengah bawah dan rendah, sementara pengaruhnya tidak terlalu terlihat pada tingkat pendapatan tinggi dan menengah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran teknologi justru cenderung lebih besar di wilayah yang masih berada dalam tahap pembangunan, karena kehadiran investasi teknologi mampu mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat secara drastis.

Kesehatan lingkungan menjadi landasan utama bagi pembentukan modal manusia yang produktif di samping faktor kemajuan teknologi informasi. Khaerunnisa & Purnamaningrum (2025) menemukan bahwa akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan rata-rata lama pendidikan memiliki pengaruh yang nyata terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akses sanitasi layak memberikan pengaruh positif yang nyata terhadap kenaikan angka IPM. Simanjuntak et al. (2024) juga menemukan hasil yang memperkuat hal tersebut, di mana akses sanitasi terbukti berpengaruh nyata terhadap IPM. Di sisi lain, akses terhadap air minum layak dalam penelitian

tersebut justru ditemukan tidak memberikan pengaruh yang terlalu nyata terhadap pembangunan manusia. Adanya temuan-temuan ini menunjukkan bahwa akses sanitasi lingkungan merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan manusia. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa variabel akses sanitasi layak sangat perlu dimasukkan sebagai salah satu faktor penentu utama dalam penelitian mengenai pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia.

Keberhasilan investasi pada teknologi dan perbaikan kesehatan lingkungan seringkali terbentur oleh masalah ekonomi yang lebih mendasar, yaitu kemiskinan. Komariyah et al. (2023) menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang nyata terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa ketika angka kemiskinan meningkat, maka kualitas pembangunan manusia akan menurun karena masyarakat menjadi sangat terbatas dalam mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang baik, serta standar hidup yang layak. Kemiskinan menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi pada kualitas diri mereka sendiri maupun kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

Penelitian Putri & Susilowati, (2024) menemukan hasil penelitian yang sedikit berbeda, di mana kemiskinan memang memiliki arah hubungan yang negatif, namun pengaruhnya ditemukan tidak selalu terlihat nyata terhadap IPM. Hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun kemiskinan cenderung menekan angka pembangunan manusia. Perbedaan temuan dari para peneliti sebelumnya ini menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pembangunan manusia sangat bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Perbedaan hasil inilah

yang membuat masalah kemiskinan sangat penting untuk diteliti kembali dalam konteks yang lebih spesifik di Kawasan Timur Indonesia.

Penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia selama ini umumnya masih dilakukan secara terpisah atau menggunakan cakupan wilayah serta periode yang berbeda-beda di setiap penelitian. Kajian mengenai teknologi informasi seringkali dilakukan pada skala luas, sementara penelitian mengenai akses sanitasi dan kemiskinan biasanya hanya berfokus pada wilayah tertentu dengan jangka waktu pengamatan yang terbatas. Pendekatan yang terpisah-pisah ini memang bisa menggambarkan kondisi di suatu tempat, namun belum mampu menangkap gambaran pembangunan manusia secara utuh dalam satu kawasan yang memiliki ciri khas pembangunan yang unik. Kawasan Timur Indonesia masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta jarak akses teknologi yang cukup lebar dibandingkan bagian barat Indonesia.

Karakteristik khusus di wilayah Timur menyebabkan angka pembangunan manusia sangat mungkin dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor teknologi, akses sanitasi, dan tingkat kemiskinan. Sampai saat ini, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus dan berkelanjutan melihat pengaruh pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), akses sanitasi layak, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia pada periode 2015–2024. Masih jarangny kajian yang menguji ketiga variabel ini secara bersamaan menunjukkan adanya ruang kosong dalam penelitian yang perlu diisi. Keterbatasan penelitian terdahulu dalam menggabungkan faktor digital, kesehatan, dan ekonomi di wilayah Timur menjadi alasan utama mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menguji pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), akses sanitasi layak, dan kemiskinan terhadap IPM secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada Kawasan Timur Indonesia menggunakan data panel periode 2015–2024. Periode waktu ini mewakili fase yang sangat penting bagi pembangunan kawasan di tengah upaya percepatan transformasi digital dan pemerataan layanan dasar yang menjadi agenda utama pemerintah saat ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang biasanya hanya fokus pada satu faktor saja atau wilayah yang terbatas, penelitian ini ingin melihat bagaimana dinamika pembangunan manusia di KTI secara terus-menerus untuk menilai seberapa besar dan stabil pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap kualitas manusia. Tanpa adanya analisis yang mendalam dan menggunakan data dalam jangka waktu yang cukup lama, kebijakan pembangunan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran karena hanya menyelesaikan masalah secara sebagian saja.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai apa saja yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara nyata bagaimana pengaruh IP-TIK, Akses Sanitasi, dan Kemiskinan terhadap angka IPM di wilayah tersebut selama periode sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Timur Indonesia: Peran IP-TIK, Akses Sanitasi dan Kemiskinan”.

1.2 Perumusan Masalah

Kurangnya pemerataan pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia menyebabkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa provinsi masih tertinggal dibandingkan wilayah lain. Walaupun IPM nasional terus meningkat, kesenjangan akses terhadap Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Akses Sanitasi, dan Kemiskinan yang relatif tinggi, membuat peningkatan kualitas hidup masyarakat belum berlangsung optimal dan merata. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024?
2. Apakah Akses Sanitasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024?
3. Apakah Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024?
4. Apakah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Akses Sanitasi, dan Kemiskinan secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Akses Sanitasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Akses Sanitasi, dan kemiskinan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas dan dari beberapa perumusan masalah serta tujuan yang dijabarkan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa khususnya pada bidang ilmu ekonomi pembangunan dalam kajian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Akses Sanitasi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia, serta dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya dengan memperhatikan kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kawasan Timur Indonesia.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan terkait peningkatan akses IP-TIK, Akses Sanitasi, serta upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia secara merata.
- 3) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia serta sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2015–2024. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Akses Sanitasi, dan Kemiskinan, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut baik secara parsial maupun simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.